



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKUASAI/DIMILIKI
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam memberikan pelayanan data dan informasi publik atas permohonan informasi dari masyarakat yang tersedia di perpustakaan, pusat informasi masyarakat maupun situs resmi perlu melakukan inventarisasi dan klasifikasi data kepemiluan dan non kepemiluan yang dimiliki/dikuasai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Tahun 2024;

b. bahwa data kepemiluan dan non kepemiluan, baik yang berupa fisik dan non fisik harus dapat diakses oleh masyarakat dengan prinsip mudah, cepat, cermat dan akurat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Daftar Informasi Publik yang Dikuasai/Dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum dan Pemilihan;
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKUASAI/DIMILIKI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang dikuasai/dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Prosedur dan tata cara mendapatkan informasi publik sebagaimana dimaksud diktum KESATU melalui Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dalam hal terdapat perubahan dikemudian hari akan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 10 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

ttd

LAELATUL IZAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Plt. Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



ANGGA BAGUS ANDRIYANTO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK
YANG DIKUASAI/DIMILIKI OLEH KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PEKALONGAN TAHUN 2025.

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

A. INFORMASI BERKALA

1. SOP Mekanism Pengajuan Keberatan Informasi Publik
2. Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa
3. Laporan Keuangan
4. Laporan Pelayanan Informasi Publik
5. Anggaran Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik Tahun 2021
6. Pedoman Pengelolaan Organisasi
7. Pedoman Kepegawaian
8. LAKIP dan TAPKIN KPU Kab Pekalongan
9. DIPA/RKA Tahun 2024
10. Realisasi / RKA KL Tahun 2024
11. RAB Pilkada Tahun 2024
12. Realisasi Pilkada Tahun 2024
13. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
14. Laporan Rakor Kehumasan dan Pengelolaan Informasi
15. SOP Mekanisme Permohonan Informasi
16. Pedoman Pengelolaan Administrasi
17. Agenda Kegiatan
18. Profil Anggota KPU Kabupaten Pekalongan
19. Data statistik Keuangan
20. Data Statistik Kepegawaian
21. Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan/Pelanggaran
22. Informasi Terkait Penerimaan Calon Pegawai
23. Informasi Rencana Startegis Komisi Pemilihan Umum Struktur Organisasi KPU Kabupaten Pekalongan

24. LHKPN
25. Renja
26. Informasi BMN
27. Pedoman Pengelolaan Keuangan 2024

B. INFORMASI SERTA MERTA

1. Informasi DCS Pemilu 2024
2. Informasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024
3. Informasi Tahapan Pemilu 2024
4. Regulasi Tahapan Pemilu 2024
5. Regulasi Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2024
6. Informasi Hasil Pemilu 2024
7. Informasi Badan Adhoc Pemilu 2024
8. Informasi Dana Kampanye Pemilu 2024
9. Informasi Anggaran Pemilu 2024
10. Informasi Anggaran Pilkada 2024
11. Panduan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Pemilu 2024
12. Informasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024
13. Informasi DCT Pemilu 2024 Kabupaten Pekalongan
14. SK Penetapan Perolehan Kursi Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan Pemilu 2024
15. SK Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan Pemilu 2024
16. Regulasi Tahapan Pilkada 2024
17. Informasi DCS Pilkada 2024
18. Regulasi Pemutakhiran Data Pemilih Pilkada 2024
19. Informasi DCT Pilkada 2024
20. Informasi Dana Kampanye Pilkada 2024
21. Informasi Badan Adhoc Pilkada 2024
22. Panduan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Pilkada 2024
23. SK Penetapan Hasil Pilkada Tahun 2024
24. SK Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pilkada 2024

C. INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT

1. Data Hasil Pilkada 2015
2. Data Hasil Pilkada 2024

3. Data Hasil Pemilu 2024
4. SK Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pilkada 2015
5. SK Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pilkada 2024
6. SK Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan Pemilu 2024
7. Daftar Nota Kesepahaman (MOU) KPU
8. Modul Pendidikan Pemilih
9. Daftar Informasi Publik Tahun 2021
10. Daftar Informasi Publik Tahun 2022
11. Daftar Informasi Publik Tahun 2023
12. Daftar Informasi Publik Tahun 2024
13. Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas
14. Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pemilu 2019
15. Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pemilu 2024
16. Buku Panduan KPPS
17. Tata Tertib Kelembagaan Yang menjadi Pedoman KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota
18. Susunan Penanggungjawab Divisi Anggota KPU Kabupaten Pekalongan
19. DPT Tahun 2019
20. DPT Tahun 2020
21. DPT Tahun 2024
22. Daftar Parpol Peserta Pemilu 2024
23. Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan Hasil Pemilu 2019
24. Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan Hasil Pemilu 2024
25. Rencana Kerja KPU

D. INFORMASI DIKECUALIKAN

1. Keputusan KPU Nomor 35/Kpts/KPU/ Tahn 2016 tentang Hasil Uji Konsekuensi Terhadap Informasi Persyaratan Pencalonan
2. Keputusan KPU Nomor 223/PL.03.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Informasi Berupa Formulir Model A-KWK
3. Keputusan KPU Nomor 335/HK.03.1-Kpt/06/KPU/VII/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Pada Formulir Model A- KWK
4. Keputusan KPU Nomor 116/Kpts/KPU Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Uji Konsekuensi terhadap Dokumen Persyaratan Pencaloanan dan Persyaratan Calon
5. Keputusan KPU Nomor 169/Kpts/KPU/ Tahun 2015 tentang Informasi Yang diKecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

6. Keputusan KPU Nomor 32/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Penetapan Informasi Berupa Formulir Model A3.KWK Dalam Peraturan KPU No 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagai Informasi Yang di Kecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 10 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

ttd

LAELATUL IZAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Plt. Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

